

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1 Kondisi Umum Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administratif Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Jakarta Utara dengan Luas 142,20 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Kota administratif Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada ± 50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan alluvium. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8-15 m. Pada bagian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 m. Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7° C – 34,4 °C

2.1.2 Lambang Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.2 Lambang Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta

Keterangan Gambar:

Lukisan Perisai segi lima yang didalamnya melukiskan gerbang terbuka.

- 1) Pada bagian atas pintu gerbang tertulis sloka “Jaya Raya”, sedang dibagian bawah perisai terdapat lukisan ombak-ombak laut.
- 2) Didalam gerbang terbuka itu terdapat “Tugu Nasional” yang dilingkari oleh untaian (krans) padi dan kapas. Sebuah tali melingkar pangkal tangkai-tangkai padi dan kapas.
- 3) “Tugu Nasional” berwarna putih.
- 4) Untaian (krans) padi berwarna kuning dan untaian (krans) kapas berwarna hijau serta putih.
- 5) Pinggiran perisai digaris tebal dengan warna emas.

- 6) Ombak-ombak laut berwarna dan dinyatakan dengan garisgaris putih, kesemuanya ini dilukiskan atas dasar yang berwarna biru.
- 7) Gerbang terbuka bagian atas berwarna putih, sedang huruf-huruf sloka “Jaya Raya” yang tertulis diatasnya berwarna merah.

Arti lambang DKI Jakarta seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1963 yaitu sebagai berikut:

- 1) Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi kemerdekaan Indonesia
- 2) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kota dilambangkan dengan gerbang (terbuka). Kekhususan Kota Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi dilambangkan dengan “Tugu Nasional” yang melambangkan kemegahan dan daya juang dan cipta Bangsa dan rakyat Indonesia yang tak kunjung padam. “Tugu Nasional” ini dilingkari oleh untaian pada dan kapas dimana pada permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah tali berwarna emas, yakni lambang cita-cita dari pada perjuangan Bangsa Indonesia yang bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur dalam persatuan yang kokoh erat. Dibagian bawah terlukis ombak-ombak laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari kota dan negeri kepulauan Indonesia. Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar warna biru, warna angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan dan cinta damai Bangsa Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam gerbang, dan pada pintu gerbang itu terteralah dengan kemegahan yang sederhana sloka “Jaya Raya” satu sloka yang menggelorakan semangat segala kegiatan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota dan Kota Perjuangan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang seimbang pada bentuk perisai segi lima yang bergaris tebal emas, sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah negara “Pancasila”.

2.1.3 Visi dan Misi Provinsi DKI Jakarta

Visi Provinsi DKI Jakarta: “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapih, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.” Penjelasan Visi:

- 1) Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
- 2) Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yng berkualitas.
- 3) Ibu Kota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
- 4) Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.

Adapun Misi Provinsi DKI Jakarta:

- 1) Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta.
- 2) Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dll.

- 3) Membangun pemerintah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
- 4) Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapih serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 5) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.

2.2 Gambaran Umum Situs Penelitian

2.2.1 Gambaran Umum Badiklat PKN BPK RI

Berdirinya Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) diawali dengan dibentuknya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK RI pada tahun 1997 dan mulai memiliki gedung sendiri di Kalibata sejak tahun 1999. Adanya tuntutan kebutuhan diklat untuk para auditor BPK yang semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas, berpengaruh pula terhadap tugas dan tanggung jawab Pusdiklat BPK, sehingga pada September 2017 Pusdiklat berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN).

Badiklat PKN sebagai salah satu unsur pelaksana tugas penunjang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, berkewajiban memenuhi implementasi salah satu strategi BPK yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK RI 2020–2024, yaitu “Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara.” Sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan strategi tersebut, Badiklat PKN mendukung pengembangan kompetensi yang dibutuhkan

oleh setiap satuan kerja (satker) dalam pengembangan Inisiatif Strategis (IS) BPK *Corporate University* (CorpU). Merespon perkembangan teknologi informasi sebagai kebutuhan internal organisasi, diperlukan sebuah inovasi dalam pengembangan kapasitas SDM dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Oleh karena itu, dengan visi “Menjadi *Corporate University* kelas dunia melalui pendidikan dan pengembangan pemeriksa keuangan negara yang kompeten dan profesional”, BPK CorpU kemudian diresmikan pada 8 April 2021.

BPK CorpU dapat dipahami sebagai sistem pembelajaran yang memiliki *learning focus* dimana kurikulum, silabus, dan bahan ajar disusun berdasarkan masalah kinerja yang dihadapi oleh individu dan organisasi dalam mendukung tujuan organisasi. Pengembangan konten materi pembelajaran dibuat yang menarik, fleksibel, dan mudah diakses sehingga bisa memfasilitasi konsep *learning from anywhere and anytime*. Pengembangan strategi pembelajaran BPK CorpU dilakukan dengan menggunakan *platform* digital *Learning Management System (LMS)* yaitu *platform* digital pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan di mana pegawai BPK maupun para pemangku kepentingan eksternal dapat mengakses pengetahuan dari *platform* LMS. Para pembelajar dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa mengganggu penugasan atau pekerjaan yang dilaksanakan.

2.2.2 Visi, Misi, dan Sasaran Strategis

Visi Badiklat PKN BPK RI, yaitu:

“Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara”

Misi Badiklat PKN BPK RI adalah:

1. Berperan aktif dalam mengembangkan metodologi dan penerapan *best practice* melalui kerjasama kediklatan dengan lembaga lain, baik dalam dan luar negeri.
2. Mengembangkan kompetensi SDM BPK, pemeriksa dan pengawas keuangan negara serta pemangku kepentingan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.

Adapun sasaran strategis Badiklat PKN BPK RI adalah, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan diklat berbasis kompetensi didalam memberikan pendapat dan meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.
2. Terwujudnya penerapan kurikulum berbasis kompetensi.
3. Terwujudnya peningkatan diklat berbasis kompetensi didalam menjalankan mandat pemeriksaan.
4. Terwujudnya efektifitas hubungan kerjasama di bidang kediklatan.
5. Terwujudnya peningkatan fasilitas pembelajaran diklat.

6. Terwujudnya peningkatan metodologi diklat.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Ditama Revbang (Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Revbang (Pasal 201).

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara dalam rangka peningkatan kompetensi/profesionalisme pegawai dan calon pegawai di lingkungan BPK berdasarkan kebijakan pengembangan SDM (Pasal 202).

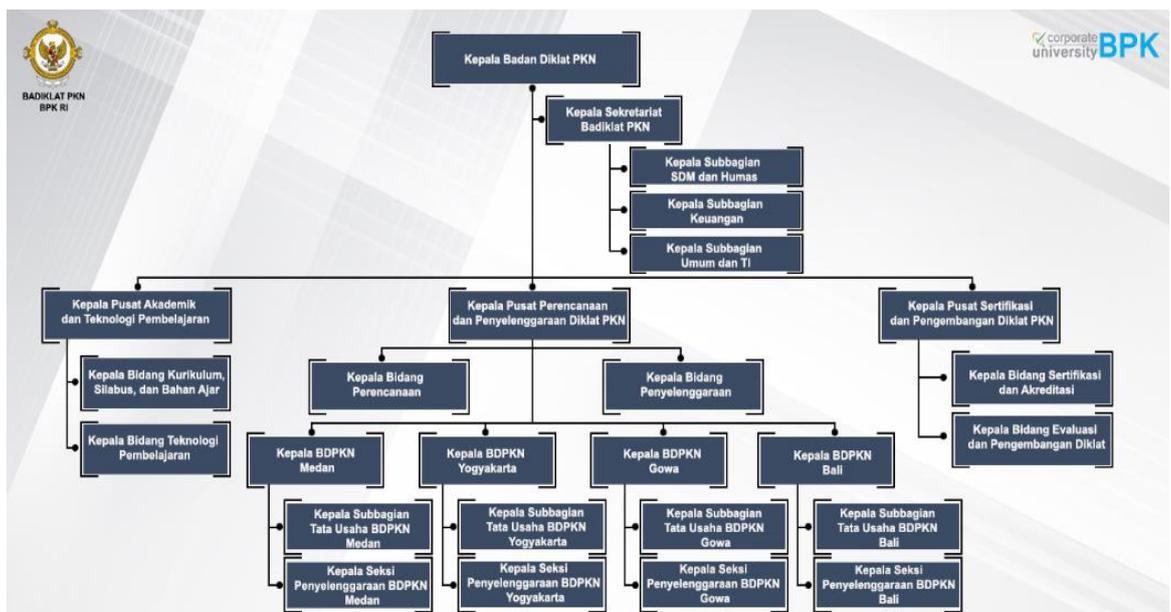
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi (Pasal 203): Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Pusdiklat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK; Perumusan rencana kegiatan Pusdiklat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi Pusdiklat; Pelaksanaan kegiatan diklat pada Pusdiklat, Balai Diklat Medan, Balai Diklat Yogyakarta dan Balai Diklat Makassar; Pelaksanaan hubungan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK; Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala Ditama Revbang; Pelaporan hasil kegiatannya secara berkala kepada Ditama Revbang.

Pusdiklat mempersiapkan pemeriksa BPK untuk dapat memahami proses penyelenggaraan keuangan negara yang sangat kompleks, serta dapat mengikuti perkembangan metodologi dan teknologi pemeriksaan mutakhir (*state of the art*). Pusdiklat juga merupakan media awal pembentukan pegawai BPK yang berintegritas, bersikap independen dan berjiwa profesional. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa BPK berawal di Pusdiklat ... *'BPK starts at Pusdiklat'*.

Pemilihan metode pembelajaran yang efektif serta penyediaan iklim belajar yang kondusif menjadi tantangan bagi Pusdiklat dalam penyelenggaraan diklat bagi para pimpinan, pemeriksa serta pelaksana di unit penunjang dan pendukung BPK RI. Untuk menjawab tantangan ini, Pusdiklat mengadopsi metode pembelajaran untuk orang dewasa (*andragogy*) dengan pendekatan pengajaran berbasis kasus (*case-based teaching*).

2.2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.3 Struktur Organisasi



2.3 Program Diklat Pemeriksaan Kinerja Badiklat PKN BPK RI

2.3.1 Tujuan dan Materi Program Diklat Pemeriksaan Kinerja

Diklat teknis pemeriksaan kinerja pada Badiklat PKN BPK RI bertujuan untuk melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan kinerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Adapun materi pada program diklat pemeriksaan kinerja, diantaranya yaitu:

1. Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja
2. Perencanaan Pemeriksaan Kinerja
3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
4. Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
5. Praktik dan Studi Kasus

2.3.2 Sasaran dan Penyelenggara Program Diklat Pemeriksaan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan semangat pembelajaran BPK Corpu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan bagi Pelaksana BPK serta pendidikan dan pelatihan bagi pihak di luar BPK. Badiklat PKN menyusun program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi pihak luar BPK. Pihak luar BPK yang dimaksud antara lain para Pengelola Keuangan Negara/ Daerah/BUMN/D,BLU/D, Desa dan sebagainya serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Satuan Pengawas Intern BUMN/BUMD,

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan pihak lain yang memerlukan pengetahuan dan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan keuangan negara. Program Diklat bagi pihak luar BPK dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan oleh penyelenggara Diklat baik di pusat (Kantor Badiklat PKN Jakarta) maupun Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN).